

PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN KOTA JAKARTA SEBAGAI KOTA METROPOLITAN MASA GUBERNUR ALI SADIKIN 1966-1977

THE JAKARTA CITY DEVELOPMENT AS A METROPOLITAN CITY, THE ERA OF GOVERNOR ALI SADIKIN IN 1966-1977

Oleh: Muhammad Ihsan Rifai, Prodi Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta, mihsan6315@gmail.com

Abstrak

Perkembangan pembangunan di Jakarta tahun 1960-an dinilai minim. Pembangunan yang minim ini disebabkan oleh kondisi Jakarta pada awal kemerdekaan mengalami situasi yang kurang kondusif untuk melakukan pembangunan karena kurangnya kas daerah. Jakarta yang merupakan wilayah ibukota Negara Indonesia sebagai pusat dari pemerintahan negara yang saat itu masih belum maju, seperti infrastruktur pembangunan yang minim dan prasarana kota yang belum memadai untuk para warganya. merubah sistem pemerintahan yang salah seperti salah satunya yaitu sistem pajak yang macet, Gubernur Ali Sadikin mulai memungut pajak dari seperti perjudian dan pajak kendaraan demi pemasukan kas daerah demi pembangunan kota metropolitan. Gubernur Ali Sadikin juga sangat peduli pada masyarakatnya sehingga memberikan pelayanan seperti kesehatan, pendidikan dan memberikan subsidi bahan pokok untuk masyarakat Jakarta.

Kata Kunci: *Jakarta, Pembangunan, Gubernur*

Abstract

Development in Jakarta in the 1960's was considered low. This low development is due to the condition of Jakarta in the early independence experiencing a situation that is less conducive to the development. Jakarta, which is the capital territory of Indonesia as the center of governments was still not advanced, such as the low development infrastructure and the city infrastructure that is not adequate for its residents. Changing the wrong system of government such as one of which was the tax system that was jammed, Governor Ali Sadikin began to collect taxes from such as gambling and vehicle taxes for regional cash revenues for the construction of the metropolitan city. Governor Ali Sadikin also cares deeply about his community by providing services such as health, education and also subsidies to the people of Jakarta.

Keywords: Jakarta, Development, Governor

PENDAHULUAN

Pada saat Ali Sadikin disumpah sebagai Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 28 April 1966 dan dipilih langsung oleh Presiden Soekarno sesuai dengan Amanat dan Keputusan Presiden No. 82 tahun 1966.¹ Di dalam amanat tersebut Presiden Soekarno mengatakan bahwa Mayjen KKO. Ali Sadikin cocok untuk memimpin kota Jakarta. Salah satu alasan Presiden Soekarno menyukai Ali Sadikin karena beliau punya latar belakang militer yaitu Angkatan Laut yang mempunyai watak yang tegas. Setelah ia terpilih sebagai gubernur, Ali Sadikin harus membenahi masalah-masalah yang ada di DKI Jakarta kala itu.

Perkembangan pembangunan di Jakarta tahun 1960-an dinilai sangat minim. Kondisi jalan pada saat itu sangat sempit dan rusak karena kurangnya pemeliharaan. Jumlah panjang jalannya kurang lebih 800 km dengan jumlah kendaraan saat itu mencapai kurang lebih 160.000 buah.² Kondisi ini membuat

kemacetan lalu lintas di jalan-jalan kota Jakarta. Di bidang transportasi terjadi ketidakseimbangan antara penumpang dan armada bus, sehingga oplet dan becak menjadi berkembang di jalanan Jakarta pada saat itu.

Pembangunan yang minim ini disebabkan oleh kondisi Jakarta pada awal kemerdekaan mengalami situasi yang kurang kondusif untuk melakukan pembangunan. Awal kepemimpinan Ali Sadikin, Jakarta yang merupakan wilayah ibukota Negara Indonesia sebagai pusat dari pemerintahan negara yang saat itu masih belum maju, seperti infrastruktur pembangunan yang minim dan prasarana kota yang belum memadai untuk para warganya.

Kota Jakarta disebut sebagai kota metropolitan, metropolitan sendiri ialah istilah yang digunakan untuk menggambarkan suatu kota yang relatif besar, baik luas wilayahnya, aktivitas ekonomi dan sosial, maupun jumlah penduduknya. Menurut undang undang nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang, daerah metropolitan adalah kawasan perkotaan yang berdiri sendiri atau kawasan perkotaan inti dengan kawasan disekitarnya. Pada 1961, status Jakarta diubah dari daerah tingkat satu menjadi Daerah Khusus Ibukota (DKI)

¹Arsip Nasional Republik Indonesia berisi Amanat Presiden Soekarno dan Pidato Pelantikan Major Jenderal KKO. AL Ali Sadikin Menjadi Gubernur DKI Jakarta Raya atas Keputusan Presiden No. 82 tahun 1966.

²Ramadhan K.H, *Bang Ali Demi Jakarta 1966-1977*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993), hlm. 98.

sesuai dengan UU No. 2 Tahun 1961.³

Kota Jakarta disebut sebagai kota metropolitan, metropolitan sendiri ialah istilah yang digunakan untuk menggambarkan suatu kota yang relatif besar, baik luas wilayahnya, aktivitas ekonomi dan sosial, maupun jumlah penduduknya. Menurut undang undang nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang, daerah metropolitan adalah kawasan perkotaan yang berdiri sendiri atau kawasan perkotaan inti dengan kawasan disekitarnya. Pada 1961, status Jakarta diubah dari daerah tingkat satu menjadi Daerah Khusus Ibukota (DKI) sesuai dengan UU No. 2 Tahun 1961.⁴

Kota Jakarta disebut sebagai kota metropolitan, metropolitan sendiri ialah istilah yang digunakan untuk menggambarkan suatu kota yang relatif besar, baik luas wilayahnya, aktivitas ekonomi dan sosial, maupun jumlah penduduknya. Menurut undang undang nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang, daerah metropolitan adalah kawasan perkotaan yang berdiri sendiri atau kawasan perkotaan inti dengan kawasan disekitarnya. Pada 1961, status Jakarta diubah dari daerah tingkat satu

menjadi Daerah Khusus Ibukota (DKI) sesuai dengan UU No. 2 Tahun 1961.⁵

Keadaan fisik Provinsi DKI Jakarta sejak permulaan gubernur Ali Sadikin menjabat adalah dengan timbulnya ketidakseimbangan antara tingkat perkembangan fisik sarana kota dengan kebutuhan penduduknya. Pada tahun 1961 Provinsi DKI Jakarta telah berpenduduk sekitar 3 juta jiwa.⁶ Peningkatan jumlah penduduk yang sangat signifikan membawa masalah dengan perlunya peningkatan sarana kotanya. Kenaikan penduduk tersebut sebagian besar disebabkan karena pendatang dari daerah-daerah luar Jakarta. Sebagian besar dari mereka merupakan penduduk yang berpenghasilan rendah yang tidak langsung beradaptasi dengan kondisi sosial dan ekonomi kota Jakarta.⁷

Pada saat Ali Sadikin menerima tanggung jawab sebagai Gubernur DKI Jakarta yang dipilih langsung oleh Presiden Soekarno tahun 1966, Ali

⁵*Ibid.*, hlm. 183.

⁶Majalah Tempo, 18 Maret 1972: 9.

⁷Gita Jaya, *Catatan Ali Sadikin Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta 1966-1977*, (Jakarta : Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, 1977), hlm. 221.

³Firman Lubis, *Jakarta 1950 - 1970*, (Jakarta : Masup Jakarta, 2018), hlm. 181.

⁴*Ibid.*, hlm. 182.

Sadikin mendapat tugas yang cukup berat untuk mengatur dan memberikan pelayanan dalam pengembangan fisik kota DKI Jakarta. Dipilihnya Ali Sadikin sebagai Gubernur pun bukan tanpa alasan, Jakarta merupakan kota pelabuhan dan dibutuhkan orang yang mengerti laut, dan sosok Ali Sadikin merupakan mantan letnan jenderal KKO-AL (Korps Komando Angkatan laut). dengan gaya sifat yang tegas, Presiden Soekarno pun tertarik untuk mengangkatnya sebagai Gubernur DKI Jakarta pada 28 April 1966.⁸

Masa jabatan Ali Sadikin yakni 11 tahun mulai dari 1966 - 1977, lebih lama dari semua pejabat sebelumnya dan menjalani dua periode masa jabatan, jabatan pertama pada tahun 1966-1972 dan jabatan kedua pada 1972-1977. Beliau diakui sebagai gubernur terbaik yang pernah memerintah Jakarta. Sebagian kesuksesannya dibantu oleh pertumbuhan ekonomi yang sangat cepat, yang terjadi selama Orde Baru ketika beliau menjabat sebagai gubernur. Ali Sadikin sangat dekat dan ramah dengan rakyat. Pada masa awal pemerintahan Ali Sadikin dalam membangun dan membenahi kota Jakarta terjadi hambatan di dalam sumber pendapatan daerah. Ibukota Jakarta hanya dibangun dengan anggaran sebesar 66 juta

rupiah yang tercantum di dalam anggaran belanja DKI. Hal ini mau tidak mau membuat Ali Sadikin memutar otak untuk mengatasi masalah anggaran pendapatan daerah. Salah satu hal yang sangat kontroversial adalah ketika Ali Sadikin memungut pajak dari pajak judi serta melegalkan praktek perjudian di Jakarta dll.⁹

Pada masa Gubernur Ali Sadikin juga menetapkan dan menjalankan Rencana Induk Jakarta 1965-1985 yang disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong pada 3 Mei 1967.¹⁰ Dijadikan sebagai acuan dalam menjalankan tugasnya sebagai Gubernur DKI Jakarta yang mengatur tentang penggunaan. Olehnya, Rencana Induk ini dibawa ke DPR-GR untuk dibahas. Melalui surat keputusan DPR-GR tanggal 3 Mei 1967, Rencana Induk Jakarta resmi menjadi landasan dalam membangun Jakarta. Rencana Induk Jakarta memang telah beberapa kali disahkan oleh lembaga

⁹Ramadhan, K.H., *Ali Sadikin Membenahi Jakarta Menjadi Kota yang Manusiawi*, (Jakarta : PT Ufuk Publishing House, 2012), hlm. 26.

¹⁰Gita Jaya, *Catatan Ali Sadikin Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta 1966-1977*, (Jakarta : Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, 1977), hlm. 4.

⁸*Ibid.*, hlm.1.

terkait. Akan tetapi, baru menjadi tindakan nyata pada masa Gubernur Ali Sadikin selain karena terus mengalami penyempurnaan.¹¹

Dibawah pemerintahan Ali Sadikin, banyak sekali pembangunan dan perubahan di kota Jakarta, seperti membenahi masalah kota Jakarta dari gubernur sebelum Ali Sadikin seperti permasalahan keuangan dan struktur perkotaan dan masalah sosial yang lain. Sayang sekali gubernur-gubernur sesudah Ali Sadikin kurang mempunyai keberanian dan ketegasan seperti Ali Sadikin dalam membenahi Kota Jakarta sehingga masalah timbul diwilayah DKI Jakarta itu sendiri, maka dari itu menarik apabila mempelajari dan meneliti kebijakan yang dijalankan Gubernur Ali Sadikin dalam keberhasilannya membangun kota Jakarta sebagai kota Metropolitan yang pertumbuhannya sangat cepat ini.¹²

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian sejarah. Pengertian metode penelitian sejarah adalah proses menguji dan menganalisis secara kritis rekaman

dan peninggalan masa lampau.¹³ Metode penelitian sejarah terdiri dari *heuristik*, kritik sumber, *interpretasi*, dan *historiografi*. Pertama, *heuristik* merupakan langkah-langkah pengumpulan sumber. Sumber yang dikumpulkan harus memiliki informasi yang sesuai dengan peristiwa yang akan diteliti. Kedua, Kritik sumber merupakan langkah-langkah untuk menentukan kebenaran informasi dari sumber-sumber sejarah yang telah diperoleh. Hal ini dilakukan agar kebenaran sejarah yang nantinya akan diungkap dapat dipertanggungjawabkan. Ketiga, *interpretasi* ini merupakan kegiatan penelitian untuk menghubungkan fakta-fakta sejarah yang diperoleh setelah melalui kritik baik intern dan ekstern. Keempat, *historiografi* atau penulisan adalah langkah terakhir dari penulisan karya sejarah. Historiografi merupakan kegiatan menyampaikan sintesis dari penelitian yang ditulis secara kronologis melalui tahap-tahap di atas.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

JAKARTA SEBAGAI DAERAH MULTI ETNIS MENUJU METROPOLITAN

¹¹*Ibid.*, hlm. 109-110.

¹²*Ibid.*, hlm. 186.

¹³Louis Gottschalk, *Mengerti Sejarah*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1985), hlm. 32.

Keadaan fisik kota Jakarta sejak permulaan masa jabatan Gubernur Ali Sadikin ditandai dengan ketidakseimbangan antara tingkat perkembangan fisik sarana kota dengan kebutuhan penduduknya. Pada awal tahun 1950-an, jumlah penduduk yang tinggal di Jakarta yang saat itu Jakarta masih daerah Kota Praja, relatif belum padat.¹⁴ Walaupun sarana tersebut telah tersedia, keadaannya memerlukan perbaikan dalam berbagai tingkatan. Keadaan sosial politik pun pada waktu itu tidak mendorong dapat dikembangkannya Jakarta secara berencana. Sebagaimana telah Gubernur Ali Sadikin ungkapkan pada terdahulu, kota Jakarta yang semula direncanakan oleh pemerintah Belanda sebelum perang hanya untuk menampung 600.000 penduduk, pada tahun 1961 telah berpenduduk kurang lebih 3 juta jiwa.¹⁵

Peningkatan penduduk yang begitu pesat tidak saja membawa masalah perlunya peningkatan secara kuantitatif sarana kotanya, tetapi juga menimbulkan kebutuhan untuk mengadakan penataan kembali struktur kota secara kualitatif. Penyesuaian secara kualitatif ini

¹⁴Firman Lubis. *Jakarta 1950 - 1970*. Jakarta : Masup Jakarta, 2018. hlm. 63.

¹⁵*Majalah Tempo*, 18 Maret 1972. hlm 9.

memperhatikan struktur yang ada dengan menyesuaikannya pada kebutuhan baru sebagai tempat kerja, pemukiman dan komunikasi.¹⁶

Pada tahun 1966, Jakarta sudah memperoleh nama resmi Ibukota Republik Indonesia. Sejak tahun itu pula Jakarta berkembang dibawah kepemimpinan Gubernur Ali Sadikin yang lebih mantap menjadi sebuah kota metropolitan, Permasalahan utama yang dihadapi oleh DKI Jakarta saat itu sekitar tahun 1970-an karena DKI Jakarta berkembang menjadi sebuah kota besar dengan arus urbanisasi yang pesat. Jakarta bisa disebut Metropolitan karena Gubernur Ali Sadikin saat itu membangun dan menata kota dengan konsep Metropolitan modern seperti contoh, DKI Jakarta menjadi pusat perdagangan, pusat pemerintahan, pusat perekonomian.¹⁷ hal ini mendorong laju pembangunan gedung-gedung perkantoran pemerintah dan kedutaan-kedutaan besar negara sahabat dan tak lupa dengan kebutuhan

¹⁶Ramadhan K.H, *Bang Ali Demi Jakarta 1966-1977*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993), hlm. 98.

¹⁷Haryo Winarso, *Metropolitan di Indonesia : Kenyataan dan Tantangan dalam Penataan Ruang*, (Penerbit : Departemen Pekerjaan Umum, 2006), hlm. 20.

masyarakatnya seperti perbaikan jalan, pusat perbelanjaan dan lain lain.¹⁸

A. PERAN ALI SADIKIN DALAM MEMBENAH PAJAK DEMI PEMBANGUNAN

Ketika Ali Sadikin mulai bertugas sebagai Gubernur DKI Jakarta tahun 1966, jumlah anggaran daerah yang diproyeksikan untuk tahun kerja yang bersangkutan adalah sebesar 266 juta rupiah. Dibandingkan dengan kebutuhan pembiayaan yang seharusnya tersedia untuk penanganan sarana dan fasilitas fasilitas perkotaan yang rata rata terabaikan pada saat itu, jumlah tersebut sungguh sangat kecil. Dalam menentukan jumlah tersebut pemerintah daerah mendasarkan pada perkiraan jumlah pendapatan yang diharapkan akan dapat diterima pada tahun yang bersangkutan. Juga proyeksi itu disesuaikan dengan sistem penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang berimbang, antara besarnya jumlah pendapatan dengan besarnya jumlah pengeluaran, sebagaimana oleh penetapan Presiden No. 26 Tahun 1965 yang berlaku pada saat

itu.¹⁹

Pada garis besarnya pelaksanaan usaha peningkatan sumber penghasilan sendiri ditempuh melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber keuangan yang telah ada (pajak-pajak, retribusi dan lain-lain), dan menggali sumber-sumber keuangan baru, bantuan pemerintah pusat dikejar, dengan tiada jemu memperjuangkan perimbangan keuangan yang lebih menguntungkan daerah.

Pada hakekatnya sumber pendapatan bagi daerah dapat dibagi dalam dua kelompok penerimaan. Penerimaan-penerimaan yang berasal dari pemerintah pusat dan penerimaan daerah sendiri.

Jenis-jenis pajak daerah yang penting dan dipungut oleh pemerintah DKI Jakarta sekarang adalah antara lain: SWP3D, pajak tontonan, pajak reklame, pajak pembangunan, pajak minuman keras, pajak anjing, pajak kendaraan bermotor, pajak perjudian.

Situasi perpajakan di Jakarta tahun 1966 sungguh sangat menyedihkan. Demikian pula keadaan aparat perpajakan pada waktu itu sangat lemah, baik dari sudut jumlah dan mutu personalia maupun

¹⁸Eni Setiati dkk. *Ensiklopedia Jakarta*, (Jakarta: PT Lentera Abadi, 2009), hlm. 55.

¹⁹Gita Jaya, *Catatan Ali Sadikin Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta 1966-1977*. (Jakarta : Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, 1977), hlm. 335-351.

sarana perlengkapan administratif. Di lain pihak terdapat peraturan-peraturan perpajakan yang sama sekali tidak sesuai lagi dengan keadaan dan kesadaran wajib pajak yang rendah. Menghadapi tantangan demikian ini, Ali Sadikin bereaksi dengan penuh kesungguhan dan secara sistematis sejak tahun pajak 1966, mengadakan pembaharuan-pembaharuan.

Perbaharuan itu meliputi penyesuaian sistem pemungutan pajak dan penyesuaian tarif-tarif pajak dengan perkembangan inflasi dan kemampuan wajib pajak.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dari tahun ke tahun meningkat dengan pesat. Hal ini merupakan kosekuensi logis dari tuntutan kebutuhan yang telah diprogramkan menurut tahapan-tahapan pelaksanaan. Anggaran tak lagi disusun berdasarkan pada jumlah perkiraan pendapatan riil semata-mata, tetapi disusun lebih banyak menurut target-target program yang ingin dicapai. Ini dilakukan untuk segera dapat mengatasi masalah pokok yang mendesak seperti ketertinggalan-ketertinggalan di berbagai bidang seperti prasarana ekonomi, sosial dan fasilitas perkotaan lainnya, yang keadaannya sangat memprihatinkan. Dalam kenyataannya penyusunan anggaran dengan cara yang demikian telah merangsang gairah aparat daerah dan masyarakat untuk lebih meningkatkan penerimaan.

Jalanlah Pemda DKI Jakarta dengan pembangunannya, sementara biaya itu sudah Gubernur Ali Sadikin dapatkan dari usaha sendiri. Dalam hal ini Gubernur Ali Sadikin tidak hanya mengandalkan aparat pemerintahan yang ada. Ia lebih suka menyiapkan fasilitas, prasarana, iklim yang baik, dan kepastian hukum yang konsisten sehingga inisiatif masyarakat sendiri bisa berkembang. Sementara itu Gubernur Ali Sadikin harus menanggulangi pengembangan fisik kota tanpa mendapatkan pedoman pengaturan dan landasan pokok bagi pengembangan kota.

B. PERAN ALI SADIKIN DALAM MEMBENAHAI INFRASTRUKTUR KOTA DAN MELAYANI MASYARAKAT

Keadaan fisik kota Jakarta sejak permulaan masa jabatan Gubernur Ali Sadikin ditandai dengan ketidakseimbangan antara tingkat perkembangan fisik sarana kota dengan kebutuhan penduduknya. Walaupun sarana tersebut telah tersedia, keadaannya memerlukan perbaikan dalam berbagai tingkatan. Keadaan sosial politik pun pada waktu itu tidak mendorong dapat dikembangkannya Jakarta secara berencana. Sebagaimana telah Gubernur Ali Sadikin ungkapkan pada terdahulu,

kota Jakarta yang semula direncanakan oleh pemerintah Belanda sebelum perang hanya untuk menampung 600.000 penduduk, pada tahun 1961 telah berpenduduk kurang lebih 3 juta jiwa.²⁰

Pada tahun 1966, Jakarta sudah memperoleh nama resmi Ibukota Republik Indonesia. Sejak tahun itu pula Jakarta berkembang dibawah kepemimpinan Gubernur Ali Sadikin yang lebih mantap menjadi sebuah kota metropolitan, Permasalahan utama yang dihadapi oleh DKI Jakarta saat itu sekitar tahun 1970-an karena DKI Jakarta berkembang menjadi sebuah kota besar dengan arus urbanisasi yang pesat. Jakarta bisa disebut Metropolitan karena Gubernur Ali Sadikin saat itu membangun dan menata kota dengan konsep Metropolitan modern seperti contoh, DKI Jakarta menjadi pusat perdagangan, pusat pemerintahan, pusat perekonomian.²¹

Masyarakat di Jakarta mulai bertambah banyak dimasa pemerintahan Gubernur Ali Sadikin, Kenaikan penduduk tersebut sebagian besar

disebabkan karena pendatang dari daerah-daerah di luar Jakarta. Sebagian besar dari mereka ini justru terdiri dari golongan masyarakat berpenghasilan rendah, yang tidak dapat menyesuaikan diri pada kondisi kota Jakarta. Karenanya mereka tidak dapat memecahkan masalah pemukimannya secara baik.²² Secara liar mereka menempati ruang ruang terbuka di sela-sela bagian kota yang terbangun. Mereka mendirikan bangunan perumahan dengan bahan yang sederhana, tidak teratur dan dengan kepadatan yang tinggi. Pada waktu itu tercatat kurang lebih 60% penduduk Jakarta tinggal di daerah perkampungan yang sangat padat.

Sarana kota yang ada tidak mampu lagi melayani kebutuhan penduduknya pada semua sektor. Keadaan ini menyangkut pula sarana-sarana administratif maupun perundang-undangan untuk menunjang perkembangan perkotaan masih belum dapat dikendalikan secara sepenuhnya. Rencana-rencana yang terperinci dari perkembangan wilayah dalam wilayah administrasi Jakarta, belum ada. Kalaulah ada, perencanaan detail yang dapat dikerjakan belum dapat mengimbangi

²⁰*Majalah Tempo*, 18 Maret 1972. hlm 9.

²¹Haryo Winarso, *Metropolitan di Indonesia : Kenyataan dan Tantangan dalam Penataan Ruang*, (Penerbit : Departemen Pekerjaan Umum, 2006), hlm. 20.

²²Soetjipto Wirosardjono. *Keadaan yang mendorong pesatnya urbanisasi di Jakarta dan implikasinya dalam Kebijakan Pemerintah*. Prisma, 1974.

desakan membangun dari masyarakat.

Pada tahun 1966 bis kota yang ada hanya beroperasi pada trayek-trayek tertentu saja. Jumlahnya jauh dari kapasitas angkutan yang diperlukan. Dikala itu juga berkembang berbagai jenis angkutan umum yang kurang efisien, seperti oplet dan becak. Pertumbuhan jumlah kedua angkutan ini ditambah dengan lajunya kenaikan kendaraan pribadi menimbulkan berbagai masalah lalu lintas. Saat itu keadaan alat angkutan umum secara fisik menurun dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena penggunaan di luar batas kemampuannya serta kurang adanya pemeliharaan dan perbaikan. Pengembangan angkutan swasta hampir tidak ada.²³

Selain membenahi masalah yang ada di Jakarta, Gubernur Ali Sadikin juga melayani masyarakat dengan prasarana dan sarana umum yang ada di Jakarta seperti Bus Perkotaan dan perbaikan jalan serta pelayanan pendidikan juga kesehatan .

Namun masalah bagi masyarakat Jakarta kala itu adalah kondisi umum kehidupan perekonomian di tanah air

sangat tidak menentu. Untuk mengatasi keadaan ditempuh langkah pengertian ekonomi oleh Pemerintah Orde Baru sebagai upaya penyelamatan. Langkah itu kemudian diikuti oleh rentetan kejadian-kejadian tradisional. Saat itu timbul gejolak masyarakat dan tuntutan mahasiswa untuk penurunan harga kebutuhan bahan pokok. Waktu itu kelancaran penyediaan bahan pokok sangat terganggu. Karenanya perhatian utama diarahkan pada penyediaan dan distribusi sembilan bahan pokok (beras, ikan asin, gula pasir, minyak kelapa, garam, minyak tanah, sabun cuci, tekstil kasar dan batik kasar). Langkah perekonomian pertama, sejajar dengan langkah yang ditempuh Pemerintah Nasional, adalah mengusahakan arus penyediaan, distribusi dan usaha menstabilkan harga bahan pokok. Hal ini menunjukkan kinerja gubernur untuk melayani dan memenuhi kebutuhan masyarakat Jakarta kala itu.

C. KESIMPULAN

Ali Sadikin adalah mantan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) Angkatan Laut yang saat itu berpangkat Letnan Jenderal KKO (Korps Komando Marinir). Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta dari tahun 1966-1977 merupakan

²³Yusuf Budiarto, *“Pembenahan Bus Kota Di Jakarta Masa Pemerintahan Ali Sadikin 1966-1977”*, *Skripsi*, (Universitas Indonesia : Depok, 2013), hlm. 4.

pengabdian yang paling mengesankan bagi Gubernur Ali Sadikin. Pada saat Ali Sadikin menerima jabatan dan disumpah sebagai Gubernur Kepala daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 28 April 1966 dan dipilih langsung oleh Presiden Soekarno. Presiden Soekarno mengatakan bahwa Mayjen KKO Ali Sadikin sesuai untuk memimpin kota Jakarta, dengan alasan karena Ali Sadikin berwatak yang keras namun disiplin. Gubernur Ali Sadikin harus membenahi masalah-masalah yang ada di DKI Jakarta kala itu.

Pada awal pemerintahan Gubernur Ali Sadikin di Jakarta, Gubernur Ali Sadikin dihadapkan dengan masalah yang kompleks seperti perekonomian daerah dan perekonomian masyarakat Jakarta dan timbulnya ketidakseimbangan antara tingkat perkembangan fisik sarana kota dengan kebutuhan penduduknya. Pada tahun 1961 Provinsi DKI Jakarta telah berpenduduk sekitar 3 juta jiwa. Peningkatan jumlah penduduk yang sangat signifikan membawa masalah dengan perlunya peningkatan sarana kotanya. Kenaikan penduduk tersebut sebagian besar disebabkan karena pendatang dari daerah-daerah luar Jakarta. Sebagian besar dari mereka merupakan penduduk yang berpenghasilan rendah yang tidak langsung beradaptasi dengan kondisi sosial dan ekonomi kota Jakarta,

akibatnya golongan ini yang menjadi tertinggal dalam kemiskinan.

Kebijakan Gubernur Ali Sadikin yang sangat ditekankan adalah pemungutan pajak untuk kebutuhan pembangunan kota yang relatif besar pada saat itu, karena pembangunan pengembangan kota dibutuhkan anggaran yang tidak sedikit, maka Gubernur Ali Sadikin berusaha supaya pemasukan daerah atau kas terisi demi jalannya pembangunan kota yang sedang direncanakan ke depan. Pajak yang dipungut berasal dari pajak perjudian, pajak tontonan, pajak hiburan, pajak retribusi dan pajak dari perusahaan daerah. Pajak-pajak yang terkumpul akan digunakan untuk pengembangan kota yang jumlah penduduknya selalu bertambah seperti DKI Jakarta. Gubernur Ali Sadikin bertujuan ingin memajukan dan memodernkan kota DKI Jakarta agar menjadi kota yang maju. Usaha-usaha beliau tidaklah mudah, Gubernur Ali Sadikin bereaksi dengan penuh kesungguhan dan secara sistematis sejak tahun pajak 1966, mengadakan pembaharuan-pembaharuan.

Perbaharuan itu meliputi penyesuaian sistem pemungutan pajak dan penyesuaian tarif-tarif pajak dengan perkembangan inflasi dan kemampuan wajib pajak.

Sejalan dengan usaha-usaha yang dilaksanakan sebagai sumber-sumber

keuangan daerah, Gubernur Ali Sadikin mengusahakan perbaikan dan penyempurnaan administrasi keuangan. Usaha ini dimaksudkan untuk meningkatkan daya guna penerimaan yang ada. Agar tidak terjadi hal yang tidak di inginkan dan anggaran dapat digunakan dengan semestinya terutama untuk pembangunan dan pengembangan fisik kota. Ali Sadikin sangat bersungguh-sungguh dalam menjalankan tugasnya sebagai gubernur, sehingga ia sangat memperdulikan keadaan para warga DKI Jakarta saat itu yang ditaksir mencapai kurang lebih 3 juta jiwa di tahun 1961 menurut Majalah Tempo tanggal 18 Maret 1972. DKI Jakarta selalu mengalami penambahan jumlah penduduk karena banyak pendatang yang beradu nasib di kota metropolitan tersebut.

Namun masalah bagi masyarakat Jakarta kala itu adalah kondisi umum kehidupan perekonomian di tanah air sangat tidak menentu. Untuk mengatasi keadaan ditempuh langkah pengertian ekonomi oleh Pemerintah Orde Baru sebagai upaya penyelamatan. Langkah itu kemudian diikuti oleh rentetan kejadian-kejadian tradisional. Saat itu timbul gejala masyarakat dan tuntutan mahasiswa untuk penurunan harga kebutuhan bahan pokok. Waktu itu kelancaran penyediaan bahan pokok sangat terganggu. Karenanya perhatian

utama diarahkan pada penyediaan dan distribusi sembilan bahan pokok (beras, ikan asin, gula pasir, minyak kelapa, garam, minyak tanah, sabun cuci, tekstil kasar dan batik kasar). Langkah perekonomian pertama, sejajar dengan langkah yang ditempuh Pemerintah Nasional, adalah mengusahakan arus penyediaan, distribusi dan usaha menstabilkan harga bahan pokok. Hal ini menunjukkan kinerja gubernur untuk melayani dan memenuhi kebutuhan masyarakat Jakarta kala itu.

Tetapi yang membuat DKI Jakarta dianggap menjadi kota metropolitan adalah dengan pembangunannya yang pesat, kas daerah yang bertambah secara signifikan untuk pembangunan daerah dan untuk pembenahan lainnya. Gubernur Ali Sadikin juga tidak lupa untuk memberi perhatian lebih untuk kesehatan, perekonomian dan pendidikan seperti yang telah dijabarkan di dalam penulisan ini.

Kota Jakarta mempunyai corak sistem perekonomian yang kompleks. Dari gerak sektor modern yang pesat, frekuensi pertumbuhan yang tinggi dan padat modal dan terbatas kemampuan penyerapan tenaga kerjanya sampai sektor yang sangat tradisional, padat karya sehingga melibatkan banyak sekali tenaga kerja tetapi lamban sekali dinamikanya.

Eksistensi dan bekerjanya sistem ekonomi demikian itu perlu disadari benar-benar guna merumuskan kebijaksanaan perekonomian kota yang tepat. Jakarta mempunyai potensi besar untuk berkembang menjadi kota modern yang sejajar dengan kota besar lainnya di dunia. Mewujudkan potensi ini dalam bentuk pembangunan merupakan tugas dan tantangan utama bagi setiap gubernur selanjutnya yang memimpin Jakarta.

DAFTAR PUSTAKA

Arsip:

ANRI, *Berisi Amanat Presiden Soekarno dan Pidato Pelantikan Major Jenderal KKO. AL Ali Sadikin Menjadi Gubernur DKI Jakarta Raya atas Keputusan Presiden No. 82 tahun 1966.*

ANRI, *Berisi Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1976 tanggal 1 April 1976 tentang Program Bantuan Kredit Pembangunan/Pemugaran Pasar.*

Majalah:

Madjalah Mingguan Djaja No. 333- Tahun VII, 8 Juni 1968.

Majalah Tempo, 18 Maret 1972.

Buku:

Ali Sadikin, *Masalah Penguasaan Tanah (Kota) Untuk Pembangunan*, Kertas Kerja dalam rangka Lokakarya II Kebijakan Tanah Perkotaan di Bandung 12-14 Juni 1975.

Ali Sadikin, *Organisasi Pemerintahan Kota Metropolitan DKI Jakarta*, Jakarta: Pemda DKI Jakarta, 1975.

Ali Sadikin, *Pengembangan Kepemimpinan dan Manajemen Pemerintahan DKI Jakarta*, Jakarta: Pemerintah DKI Jakarta, 1970.

Arrohman Prayitno, *Ali Sadikin, Visi dan Perjuangan sebagai Guru Bangsa*, Jakarta : Universitas Trisakti, 2004.

Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika, 1991.

Badan Pengurus Pekan Raya Jakarta, *Pekan Raya Jakarta 1975*, Jakarta: Biro Humas dan Protokol, 1978.

Dudung Abdurahman, *Metode Penelitian Sejarah*. Jakarta: Penerbit Logos, 1999.

Dadang Supardan, *Pengantar Ilmu Sosial: Sebuah Kajian Pendekatan Struktural*, Jakarta: Bumi Aksara, 2013.

Departemen Pertahanan Keamanan, *Doktrin Pertahanan Keamanan Nasional dan Doktrin Perjuangan ABRI*, Jakarta: Departemen HANKAM, 1969.

Departemen Penerangan RI. *Repelita II 1974/1975 - 1978/1979*, Jakarta: Departemen Penerangan RI, 1979.

Djoko Suyarto, "Bias Kota Raksasa Serupa Jakarta", dalam *prisma*, No. 5 tahun XXI, 1992.

Edi Sedyawati dkk, *Sejarah Kota Jakarta 1950-1980*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1986.

Eni Setiati dkk, *Ensiklopedia Jakarta*. Jakarta: PT Lentera Abadi. 2009.

- Firman Lubis, *Jakarta 1950 – 1970*, Jakarta : Masup, 2018.
- GBHN Indonesia: “Garis Besar Haluan Negara” Ketetapan MPR No. IV/MPR/1973 Departemen Penerangan RI.
- Gita Jaya, *Catatan Ali Sadikin Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta 1966-1977*, Jakarta: Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, 1977.
- Haryo Winarso. *Metropolitan di Indonesia : Kenyataan dan Tantangan dalam Penataan Ruang*, Penerbit: Departemen Pekerjaan Umum, 2006.
- Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, Yogyakarta : Tiara Wacana, 2013.
- Kantor Sensus & Statistik, *Jakarta Dalam Angka 1974*, Jakarta: Kantor Sensus & Statistik, 1975.
- Louis Gottschalk, *Mengerti Sejarah : Pengantar Metode Sejarah*, Terj. Nugroho Notosusanto, *Understanding History: A Primer of Historical Method*, Jakarta: UI Press, 1975.
- M. Dawam Rahardjo, *Ilmu Sejarah Profetik dan Analisis Transformasi Masyarakat dalam Kuntowijoyo, Paradigma Islam: Interpretasi untuk Aksi*, Bandung: Mizan, 1998.
- Proyek Penelitian dan Pencatata Kebudayaan daerah, *Sejarah Daerah DKI Jakarta*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Proyek Penerbitan Buku Bacaan dan Sastra Indonesia dan Daerah, 1978.
- Ramadhan, K.H. *Bang Ali demi Jakarta (1966-1977)*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1992.
- Ramadhan, K.H. *Ali Sadikin Membenahi Jakarta Menjadi Kota yang Manusiawi*. Jakarta : PT Ufuk Publishing House, 2012.
- Sartono Kartodirjo, *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah*, Yogyakarta: Ombak, 2014.
- Soetjipto Wirosardjono. *Keadaan yang mendorong pesatnya urbanisasi di Jakarta dan implikasinya dalam Kebijaksanaan Pemerintah*. Prisma, 1974.
- Soetjipto Wirosardjono, “Urbanization Environmental Problems in Indonesia”. *With particular reference to the prevailing conditions in Jakarta*. Jakarta, 1975.
- Tim Prodi Ilmu Sejarah, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Ilmu Sejarah*, Yogyakarta: Prodi Ilmu Sejarah FIS UNY, 2013.
- Tri wahyuning, “*Berkembang dalam bayang-Bayang Jakarta: sejarah Depok 1950-1990-an*” Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017.

Internet:

Jakarta 1966: Kota yang Keberatan Beban”
<http://gitajaya77.blogspot.com/2012/09/gita-jaya-7-jakarta-1966-kota-yang.html>., Diakses pada tanggal 10 Juni 2019, pukul 12:40 WIB.

Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tanggal 31 Juli 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah pasal 55 dan 56. Website: <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/1974/5TAHUN~1974UU.HTM>. Diakses pada tanggal 10 Juni 2019, pukul 12:08 WIB.

Skripsi:

Fikri, *"Lokalisasi Kramat Tunggak Pada Masa Gubernur Ali Sadikin 1971-1977"*, Skripsi, Depok: UI, 2011.

Yusuf Budianto, *"Pembenahan Bus Kota Di Jakarta Masa Pemerintahan Ali Sadikin 1966-1977"*, Skripsi, Depok: UI, 2013.

Yogyakarta, 8 November 2019

Pembimbing

Reviewer



Dr. Miftahuddin, M.Hum.
NIP.19740302 200312 1 006

Ita Mutiara Dewi, S.I.P., M. Si.
NIP. 19810321 200312 2 001

